

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chandler, J., & Kennedy, K. S. (2015). A network approach to capacity building. *National Council of Nonprofits*.
- Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial (; Toto Rahardjo, Ed.). *Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset*.
- Hadi, Sudharto dkk. (2014). *Penguatan Governance Dan Kelembagaan Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardjanto, Imam. (2006) *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building*. Universitas Brawijaya Press.
- Mosse dan Julia Cleves. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sumpeno, W. (2002). Capacity Building Persiapan dan Perencanaan.

JURNAL

- Eade, D. (2007). Capacity building: who builds whose capacity?. *Development in practice, 17(4-5)*, 630-639.

- García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., ... & Watts, C. (2015). Addressing violence against women: a call to action. *The Lancet*, 385(9978), 1685-1695.
- Gibson, C., H. Hardy III, J., & Ronald Buckley, M. (2014). Understanding the role of networking in organizations. *Career Development International*, 19(2), 146-161.
- Irawati, M. A. (2015). Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(2).
- Legge, K., & Legge, K. (1995). *What is human resource management?* (pp. 62-95). Macmillan Education UK.
- Lestari, E. P., Dwimawanti, I. H., Lituhayu, D., & Yuniningsih, T. (2022). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 83-100.
- Nawi, R. (2015). Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Kualitas Pelayanan, penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan. *Pleno Jure*, 4(5), 42-55
- Mu'arofah, S., Hanafi, I., & Saleh, C. (2013). Perencanaan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam E-Procurement. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(4), 207-214.

- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79.
- Suhendri, S., & Purnomo, E. P. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 174-204.
- Purnaningsiwi, F. A., Sundarso, S., & Rengga, A. (2014). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 192-200.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal riset akuntansi terpadu*, 10(1).
- Suhendri, S., & Purnomo, E. P. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 174-204.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).

Sutriarti, S. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Semarang Dalam Mengkoordinir Lembaga-Lembaga Layanan Untuk Memulihkan Hak-Hak Dam Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Doctoral dissertation, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG).

Torfin, J. (2005). *Governance network theory: towards a second generation. European political science, 4*, 305-315.

Wahab, R. (2010). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia, (61)*, 247-256

Weber, E. P., & Khademian, A. M. (2008). Wicked problems, knowledge challenges, and collaborative capacity builders in network settings. *Public administration review, 68(2)*, 334-349.

Windiani, R., & Astuti, P. (2013). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan dan Keadilan Untuk Korban KDRT. *Journal of Politic and Government Studies, 2(3)*, 496-510.

Zetra, A. (2009). Strategi pengembangan kapasitas sdm pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 13 dan 14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SK Walikota Semarang Nomor 463/05 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang

WEBSITE

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <https://semarangkota.bps.go.id/> pada tanggal 19 Oktober 2022 pada jam 21.00 WIB.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2016). Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015. Diakses dari <http://satudata.semarangkota.go.id/> pada tanggal 19 Oktober 2022 pada jam 21.00 WIB.

Dihni, (2021, November 24). Perempuan di Jawa Tengah Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual pada 2020. [databoks.katadata](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/perempuan-di-jawa-tengah-paling-banyak-alami-kekerasan-seksual-pada-2020). diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/perempuan-di-jawa-tengah-paling-banyak-alami-kekerasan-seksual-pada-2020>

Tanpa nama, (2021, Maret 5). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021). [komnasperempuan](https://komnasperempuan.org/).

(<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>)

Tanpa nama, (2022, Oktober 5). ASIKK PAK - Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2022 - 6 Oktober 2022. <http://kekerasan.dp3a.semarangkota.go.id/>